

**KESENJANGAN ANTARA KONDISI PENDIDIK,  
PENGELOLAAN SERTA SARANA DAN PRASARANA DI  
PROVINSI BANTEN DENGAN STANDAR NASIONAL  
PENDIDIKAN**

**Abstrak:**

*Tujuan penelitian ini untuk melakukan identifikasi kesenjangan antara kondisi pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana Sekolah Dasar di Provinsi Banten dengan Standar Nasional Pendidikan. Identifikasi pertama mengkaji nilai kontribusi variabel pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana sekolah terhadap hasil belajar dan menganalisa dampak peningkatan ketiga variabel tersebut terhadap mutu pendidikan. Selain itu, dengan menggunakan nilai kontribusi ketiga variabel tersebut, dapat ditetapkan penentuan prioritas peningkatan berdasarkan urutan besaran nilai kontribusinya.*

*Identifikasi kedua tentang ketersediaan data yang mutakhir dan akurat yang dapat memberikan gambaran kondisi pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana Sekolah Dasar di Provinsi Banten. Data tersebut meliputi berbagai parameter yang digunakan dalam penentuan standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dengan Standar Nasional Pendidikan untuk bidang pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana sekolah.*

*Identifikasi ketiga berkenaan dengan kontribusi variabel pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana Sekolah Dasar terhadap hasil belajar di Provinsi Banten. Berdasarkan besaran kontribusi tersebut dapat ditetapkan prioritas peningkatan dalam komponen pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana sekolah untuk meningkatkan hasil belajar siswa di Provinsi Banten.*

**Kata Kunci :** *Identifikasi, kesenjangan, pendidik, pengelolaan, sarana dan prasarana, Standar Nasional Pendidikan*

## **Pendahuluan**

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, pada hakekatnya, memiliki fungsi sebagai: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Dengan fungsi ini, pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah secara proaktif. Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah menetapkan salah satu misinya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional dan internasional. Dalam usaha peningkatan mutu tersebut, pemerintah menyusun Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan standar minimal bagi penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Standar ini mengikat untuk setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan serta berlaku secara nasional.

PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat delapan (8) lingkup SNP: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Penelitian ini memfokuskan pada pendidik, pengelolaan, dan sarana prasarana. Ketiga

komponen tersebut dianggap **memiliki** peranan yang besar terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Bank Dunia (1989) memperlihatkan bahwa guru, manajemen, dan **sarana** serta prasarana merupakan penentu mutu pendidikan masing-masing sebesar 34%, 22%, dan 26% di negara-negara berkembang.

Tujuan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP adalah meningkatkan mutu pendidikan yang tercermin dalam hasil belajar siswa. Mengingat PP tersebut relatif baru diterbitkan, informasi yang selama ini tersedia, misalnya dalam *Indonesia Educational Statistics in Brief* 2004/2005,<sup>1</sup> belum meliputi parameter dalam standar nasional pendidikan. Dengan demikian, penelitian mengenai pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana yang dikaitkan dengan hasil belajar siswa diperlukan untuk **mengetahui** kondisi pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana Sekolah Dasar Negeri, yang didasarkan pada parameter dalam SNP, untuk mengidentifikasi kesenjangan dengan standar tersebut. Di samping itu, kajian mengenai kontribusi pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana sekolah terhadap hasil belajar diperlukan untuk memastikan **bahwa** peningkatan pada ketiga komponen tersebut akan meningkatkan **mutu** pendidikan. Dalam hal lain, hasil kajian mengenai kontribusi pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana sekolah terhadap **hasil** belajar juga dapat digunakan untuk menetapkan prioritas **penanganan** bilamana dihadapkan pada keterbatasan sumber daya untuk peningkatan tiga komponen masukan instrumental tersebut sekaligus.

Sebagai provinsi baru, **pembangunan** sektor pendidikan khususnya penuntasan wajib belajar 9 tahun di Provinsi Banten dinilai masih tertinggal. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2006.<sup>2</sup> Selain itu, MONE<sup>3</sup> menunjukkan bahwa angka melanjutkan sekolah (*continuation rate*) dari jenjang sekolah menengah atas ke jenjang pendidikan tinggi di Provinsi Banten hanya mencapai 8,14%. Ini merupakan angka melanjutkan sekolah kedua terendah secara nasional setelah Provinsi Bangka Belitung (5,59%). Sarana dan prasarana sekolah

di Provinsi Banten juga dalam kondisi masih memprihatinkan. Di Kabupaten Lebak, misalnya, dari 763 unit Sekolah Dasar (SD), 80% (500 unit) dalam keadaan rusak.<sup>4</sup> Dengan demikian, Provinsi Banten merupakan provinsi yang sangat memerlukan pengembangan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Penelitian mengenai kondisi pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana sekolah merupakan langkah penting untuk menyediakan informasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Provinsi Banten.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kondisi pendidik, pengelolaan, sarana dan prasarana, serta hasil belajar siswa SD di Provinsi Banten berdasarkan parameter SNP? dan (2) Bagaimana kontribusi pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana sekolah terhadap hasil belajar siswa SD di Provinsi Banten?

Lingkup wilayah penelitian dibatasi dalam Provinsi Banten. Kabupaten/Kota yang dipilih sebanyak dua kabupaten/kota. Ruang lingkup penelitian ini ialah meliputi SD Negeri (SDN) di Provinsi Banten. SD Negeri di Provinsi Banten sebanyak 4.072 (94,24%). Dengan demikian, karena proporsi SDN yang tinggi, kajian mengenai SDN di Provinsi Banten sangat mewakili SD yang berada di provinsi ini.

Lingkup metode penelitian pada penelitian ini ialah penelitian dengan pendekatan kuantitatif: (1) Survei untuk mendeskripsikan kondisi sekolah berdasarkan parameter SNP; dan (2) *ex-post facto* (hubungan kausal) untuk mengungkap kontribusi pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana SDN terhadap hasil belajar siswa sekolah.

## 1. Pendidik

Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik pada jenjang pendidikan dasar disebut guru.

Guru merupakan salah faktor penentu yang paling besar terhadap mutu pendidikan. Hasil studi Bank Dunia (1989) menunjukkan bahwa faktor guru menentukan 34% mutu guru untuk negara berkembang dan sebesar 36% untuk negara maju. Dengan demikian, lebih dari sepertiga variasi mutu pendidikan dapat dijelaskan oleh variabel guru. Tidak berlebihan bilamana Brandt<sup>5</sup> mengemukakan bahwa hampir semua reformasi di bidang pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan penerapan metode mengajar baru pada akhirnya tergantung pada guru. Lebih lanjut Banicky dan Foss<sup>6</sup> menyimpulkan bahwa mutu guru memiliki dampak yang lebih besar terhadap hasil belajar dibandingkan ukuran kelas, iklim sekolah, pengelompokan kemampuan siswa, atau lokasi sekolah.

Mutu guru dicirikan oleh penguasaan yang mendalam terhadap materi yang diajarkan, kemampuan untuk menyajikan dan menyesuaikan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran, dan keterampilan mengelola kelas sehingga memungkinkan siswa belajar secara aktif.<sup>7</sup> Belajar aktif siswa merupakan kondisi yang diinginkan dalam paradigma baru pembelajaran. Peran guru berubah dari *dispenser* pengetahuan menjadi fasilitator belajar, seperti yang dinyatakan dalam tabel berikut.<sup>8</sup>

Peran Tradisional Guru	Peran Baru Guru
Menyampaikan informasi	Membantu siswa memproses informasi
Berkomunikasi dengan individu-individu	Berkomunikasi dengan kelompok siswa
Mengarahkan kegiatan siswa	Membimbing kegiatan siswa
Menjelaskan hubungan konseptual	Memfasilitasi belajar siswa
Mengarahkan penggunaan buku teks dsb.	Menggunakan bahan secara fleksibel

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, mutu guru dicirikan oleh penguasaan terhadap materi yang diajarkan, kemampuan memfasilitasi pembelajaran, dan keterampilan mengelola kelas sehingga memungkinkan siswa belajar secara aktif. Supriadi<sup>9</sup> menyatakan bahwa guru sebagai seorang profesional paling tidak memiliki tiga unsur: (1) Pendidikan yang memadai, (2) keahlian dalam bidangnya, dan (3) komitmen pada tugasnya.

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 mengenai SNP dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar meliputi: (1) Kompetensi pedagogik, (2) kompetensi profesional, dan (3) kompetensi sosial. Berdasarkan uraian di atas, variabel pendidik dalam penelitian ini meliputi indikator kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Ketiga hal tersebut diukur melalui kualifikasi pendidikan, pengalaman mengajar, dan pendidikan dan pelatihan yang diperoleh dalam jabatan untuk meningkatkan profesionalitas pendidik.

### **Pengelolaan Sekolah**

Menurut UU Sisdiknas Tahun 2003, pengelolaan satuan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional.<sup>10</sup>

Esensi dari MBS adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan (kemandirian), yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Dengan pola MBS, sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) yang lebih besar dalam mengelola manajemennya sendiri. Kemandirian tersebut di antaranya meliputi penetapan sasaran peningkatan mutu,

penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan rencana peningkatan mutu dan melakukan evaluasi peningkatan mutu. Di samping itu, sekolah juga memiliki kemandirian dalam menggali partisipasi kelompok yang berkepentingan dengan sekolah. Dengan kemandiriannya, maka:

- a. Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibanding dengan lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.
- b. Sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan input pendidikan yang akan **dikembangkan** serta didayagunakan dalam proses pendidikan **sesuai** dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- c. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada, umumnya, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
- d. Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah yang lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.

Sekolah yang mandiri terkait dengan efektivitas sekolah. Ciri sekolah yang efektif adalah sebagai berikut:

- a. Visi dan misi yang jelas dan target mutu yang harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara lokal.
- b. Sekolah memiliki output yang selalu meningkat setiap tahun.
- c. Lingkungan sekolah aman, tertib, dan menyenangkan bagi warga sekolah.
- d. Seluruh personil sekolah memiliki visi, misi, dan harapan yang tinggi untuk berprestasi secara optimal.

- e. Sekolah memiliki sistem evaluasi yang berkesinambungan dan komprehensif terhadap berbagai aspek akademik dan non akademik.

PP Nomor 19 Tahun 2005 mengenai SNP berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, pengelolaan sekolah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mencerminkan penerapan peningkatan mutu MBS yang berkaitan dengan pengelolaan: (1) Sumber daya manusia sekolah; (2) proses belajar mengajar; (3) pelayanan siswa; (4) pengelolaan sarana dan prasarana; (5) pengelolaan keuangan; (6) peningkatan secara berkelanjutan; dan (7) pembinaan hubungan antara sekolah dan masyarakat.

### **Sarana dan Prasarana**

Schneider<sup>11</sup> menghasilkan temuan pengaruh beberapa aspek sarana dan prasarana sekolah terhadap capaian akademik beserta konsistensinya dalam sejumlah penelitian mengenai pengaruh tersebut.

#### **a. Udara Bersih**

Secara konsisten, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi spasial lingkungan sekolah dan kelas mempengaruhi mutu pembelajaran. Konfigurasi tersebut meliputi udara yang bersih, pencahayaan yang baik, tidak bising, nyaman dan aman. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa udara yang tidak bersih berkaitan dengan sering sakitnya guru atau siswa, dan pada gilirannya berkaitan dengan kinerja yang tidak optimal.

#### **b. Pencahayaan**

Meskipun sudah jelas bahwa kegiatan belajar dalam ruangan kelas memerlukan pencahayaan yang cukup, hasil-hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa cahaya siang hari (*daylight*) merupakan pencahayaan paling baik untuk kegiatan belajar. Penelitian mengenai penggunaan lampu dengan spektrum penuh, untuk menggantikan

cahaya siang hari, dinilai tidak menghasilkan temuan yang meyakinkan. Dengan demikian, sejauh ini cahaya siang hari yang mencukupi merupakan pencahayaan terbaik untuk kegiatan belajar. Hal ini juga mengakibatkan bahwa, dari segi pencahayaan, waktu belajar terbaik adalah pada siang hari.

c. Akustik

Penelitian-penelitian mengenai akustik pada ruang kelas menunjukkan bahwa tingkat kebisingan berpengaruh terhadap hasil belajar. Standar kebisingan yang disepakati dan telah disahkan di Amerika Serikat adalah bahwa kebisingan maksimum sebesar 35 desibel dan gaung (*reverberation*) sebesar 0,6 sampai 0,7 detik pada ruangan kosong. Pada level proses hal ini dapat diimplementasikan dalam penentuan lokasi sekolah yang berjauhan dari sumber kebisingan.

d. Usia, Mutu, dan Estetika Gedung Sekolah

Sejauh ini penelitian mengenai pengaruh langsung dari variabel usia, mutu, dan estetika bangunan sekolah terhadap hasil belajar belum menghasilkan temuan yang jelas. Beberapa penelitian mengenai hal ini juga memperlihatkan kelemahannya. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian mengenai pengaruh langsung dari variabel usia, mutu, dan estetika bangunan sekolah terhadap hasil belajar belum dapat dijadikan dasar untuk penentuan standar.

e. Ukuran Sekolah

Ukuran sekolah (*school-size*) ialah banyaknya siswa dalam satu sekolah. Ukuran sekolah yang kecil berkaitan dengan prestasi belajar siswa yang tinggi. Sekolah tersebut dapat menampung sekitar 60-75 siswa untuk TK, 200-400 siswa untuk SD, 400-600 siswa untuk SMP, dan 600-800 siswa untuk SMA. Ukuran sekolah yang kecil lebih memungkinkan siswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan latihan kepemimpinan. Selain itu, kepuasan siswa dan partisipasi pada organisasi sosial berkaitan dengan ukuran sekolah yang kecil. Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kemampuan matematika dan bahasa dengan ukuran sekolah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian menunjukkan konsensus yang definitif mengenai pengaruh positif ukuran sekolah. Pengaruh positif tersebut terutama paling kuat pada siswa-siswa dari kelompok sosial-ekonomi rendah.

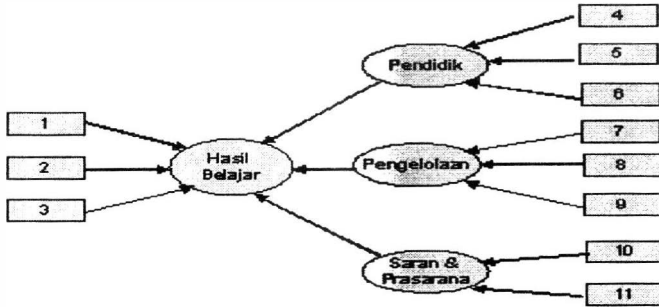
f. **Ukuran Kelas**

Ukuran kelas adalah banyaknya siswa dalam suatu ruangan kelas, bukan rasio guru terhadap siswa. Berbeda dengan ukuran sekolah, penelitian-penelitian mengenai ukuran kelas menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara ukuran kelas dengan kinerja atau hasil belajar. Pada kenyataannya, hasil penelitian Balitbang Depdiknas (2004) mengungkapkan bahwa ukuran kelas rata-rata secara nasional baru 26 siswa. Dengan demikian, ukuran kelas kecil mungkin dilaksanakan tanpa meningkatkan jumlah kelas atau jumlah sekolah.

Standar sarana dan prasarana adalah SNP yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan atau keberadaan dan kualitas fasilitas sekolah tersebut merupakan ukuran mutu sarana dan prasarana sekolah.

### **Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kajian dan kebijakan yang terkait dengan pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana pada satuan pendidikan sekolah dasar, penelitian ini akan didasarkan pada kerangka konseptual seperti yang digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Nomor pada gambar menyatakan variabel berikut :

1. Rata-rata skor ujian sekolah (US)
2. Angka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi
3. Tingkat DO dan angka tinggal kelas
4. Kualifikasi pendidikan guru
5. Pengalaman mengajar
6. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan untuk pengembangan profesi
7. Perencanaan berkaitan dengan sumber daya manusia sekolah, proses belajar mengajar, pelayanan siswa, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, peningkatan secara berkelanjutan, dan pembinaan hubungan antara sekolah dan masyarakat.
8. Pelaksanaan berkaitan dengan berkaitan dengan sumber daya manusia sekolah, proses belajar mengajar, pelayanan siswa, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, peningkatan secara berkelanjutan, dan pembinaan hubungan antara sekolah dan masyarakat
9. Pengawasan berkaitan dengan sumber daya manusia sekolah, proses belajar mengajar, pelayanan siswa, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, peningkatan secara berkelanjutan, dan pembinaan hubungan antara sekolah dan masyarakat

10. Ketersediaan ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
11. Kecukupan dan kualitas ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

## **Pembahasan**

Unit analisis penelitian ini ialah sekolah. Sampel penelitian terdiri dari 564 guru dan 79 kepala sekolah dari 79 SDN yang berada di dua Kabupaten di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Setiap sekolah mengisi dua jenis kuesioner: *Pertama*, satu buah kuesioner untuk informasi sekolah yang diisi oleh kepala sekolah; *kedua*, tujuh kuesioner untuk guru yang masing-masing diisi oleh guru. Guru yang mengisi kuesioner informasi pendidik di sekolah paling banyak berjenis kelamin wanita (62,9%). Berdasarkan usia, responden guru secara rata-rata berusia empat puluhan. Statistik usia responden guru adalah sebagai berikut. Rata-rata dengan nilai (40,91), maksimum dengan nilai (59) minimum dengan nilai (20) dan simpangan baku (7,78)

Kepala sekolah yang mengisi kuesioner informasi mengenai sekolah memiliki karakteristik seperti yang tercatat pada Tabel 4-3. Pada tabel terlihat bahwa hampir 70% sampel kepala sekolah memiliki golongan IV dan memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun. Sebagian kepala sekolah merangkap sebagai guru kelas. Dengan demikian, kepala sekolah yang memiliki peran sentral dalam pengembangan sekolah di lapangan memiliki beban yang berat karena selain mengurus manajemen sekolah juga merangkap mengajar di kelas dan mengurus administrasi sekolah.

Tabel.1 Karakteristik Sampel Kepala Sekolah

Karakteristik	F	%
Pangkat/Golongan		
• Gol III	22	28,2
• Gol IV	54	69,2
• Lainnya	2	2,6
Pengalaman sebagai Kepsek		
• < 5	4	5,2
• 5 – 10	7	9,1
• 11 – 15	7	9,1
• > 15	68	76,6
Merangkap sebagai Guru		
• Ya	24	66,7
• Tidak	52	30,8
• (Tidak Menjawab)	2	2,6

### Kondisi Hasil Belajar, Pendidik, Pengelolaan, dan Sarana & Prasarana

1. Hasil Belajar, hasil belajar untuk taraf sekolah dilihat dari ujian sekolah, prestasi siswa, angka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, angka putus sekolah, dan angka tinggal kelas.
2. Ujian Sekolah, ujian sekolah dirancang untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Dengan demikian, hasil ujian sekolah diharapkan mencerminkan hasil belajar siswa. Statistik hasil ujian sekolah tahun 2006.

Tabel 2. Rata-Rata Hasil Ujian Sekolah

Mata Pelajaran	Rata-rata	Tertinggi	Terendah
Agama	6,71	8,00	5,21
Matematika	5,98	7,61	3,21
IPA	6,37	8,14	4,64
IPS	6,65	8,14	5,03
PPKN	7,12.	9,90	5,55
Bahasa Indonesia	6,65	8,80	5,47

Pusat Pengujian Balitbang Diknas membuat klasifikasi sekolah, berdasarkan pada rata-rata NEM sekolah. Setiap sekolah digolongkan menjadi 5 (lima) klasifikasi pada masing-masing mata pelajaran yang di-btanas-kan dan jumlah NEM. Kelima klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

RATA-RATA NEM		KLASIFIKASI
$NEM > 7.50$	A	Sangat Baik
$6.50 < NEM \leq 7.50$	B	Baik
$5.50 < NEM \leq 6.50$	C	Sedang
$4.50 < NEM \leq 5.50$	D	Kurang
$NEM \leq 4.50$	E	Kurang Sekali

Berdasarkan klasifikasi tersebut di atas, kondisi hasil belajar siswa SDN di Provinsi Banten adalah secara rata-rata tergolong sedang untuk mata pelajaran PPKN saja. Untuk mata pelajaran lainnya (Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Agama, dan IPS) kondisi hasil belajar SDN di Provinsi Banten tergolong kurang.

#### 1. Prestasi Siswa

Prestasi siswa pada berbagai lomba, baik yang terkait dengan mata pelajaran maupun yang tidak terkait dengan mata pelajaran, mencirikan hasil belajar siswa pada sekolah tersebut. Gambaran keikutsertaan siswa pada berbagai perlombaan yang terkait dengan mata pelajaran dalam lima tahun terakhir ini. Keikutsertaan sekolah pada perlombaan tersebut baru pada tingkat Kecamatan, Kabupaten, atau Provinsi.

Tabel 3. Keikutsertaan dalam Perlombaan terkait Mata Pelajaran

Tingkat	Jumlah Keikutsertaan	Sebagai Juara		
		I	II	III
Provinsi	4	-	4	-
Kabupaten	23	6	5	1
Kecamatan	86	21	14	3

a. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi merupakan salah satu indikator hasil belajar siswa. Angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tersebut dihitung dari persentase siswa yang melanjutkan sekolah terhadap jumlah siswa yang lulus. Makin tinggi angka tersebut menunjukkan makin baik hasil belajar siswa. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa faktor kesempatan (ekonomi, geografis, sosial) dianggap sama untuk tiap sekolah. Tabel 4-7 menunjukkan statistik sekolah dalam hal angka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 4. Statistik Angka Melanjutkan Studi

Statistik	Nilai
Rata-rata	0,88
Minimum	0,30
Maksimum	1,00
Simpangan Baku	0,15

Untuk melihat sebaran sekolah berdasarkan angka melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, nilai angka tersebut diklasifikasikan berdasarkan nilai interval. Sebaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sebaran Sekolah Berdasarkan Angka Melanjutkan Studi

Klasifikasi	Jumlah Sekolah	Persentase
0 – 20%	-	
21 – 40%	1	1,3
41 – 60%	3	3,9
61 – 80%	8	10,4
81 – 100%	55	84,4

2. Pendidik

Variabel pendidik terdiri dari beberapa indikator berikut: (a) Kecukupan guru yang dilihat dari rasio guru dengan jumlah kelas dan jumlah siswa; (b) jenjang pendidikan terakhir; (c) pengalaman mengajar; dan (d) pendidikan serta pelatihan dalam jabatan untuk pengembangan profesi.

a. Kecukupan Guru

Statistik rasio jumlah guru terhadap jumlah rombongan belajar dan rasio jumlah guru terhadap jumlah siswa dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Statistik Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar dan Siswa

	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Simpangan Baku
Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar	0,88	2,44	0,14	0,37
Rasio Guru terhadap Siswa	30,67	70,58	11,22	11,23

Pada Tabel 5 tampak bahwa secara rata-rata seorang guru menangani tidak lebih dari satu kelas. Meskipun demikian, di beberapa sekolah seorang guru dapat menangani lebih dari dua kelas. Secara rata-rata, rasio guru-siswa sudah mendekati standar yang ditetapkan oleh BNSP, yaitu sebesar 28. Meskipun demikian, masih ada sekolah dengan rasio lebih dari 70 siswa per guru.

b. Kualifikasi Pendidikan Guru

Jenjang pendidikan terakhir para guru yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut

kebanyakan guru (67,5%) berpendidikan D2 kependidikan. Dengan demikian, untuk mencapai guru SD yang berpendidikan S1 masih perlu upaya yang banyak. Guru dengan pendidikan S1 baru mencapai 23,2%.

c. Pengalaman Mengajar

Pengalaman mengajar guru dinyatakan dalam Tabel 4-11. Pengalaman mengajar pada tabel ini belum memperhitungkan pengalaman mengajar di sekolah-sekolah sebelumnya.

Tabel 8 Pengalaman Mengajar

Pengalaman Mengajar	F	%
1 – 5 tahun	198	39.44
6 – 10 tahun	116	23.10
11 – 15 tahun	91	18.12
> 15 tahun	97	19.32

### 3. Pengelolaan Sekolah

Variabel pengelolaan sekolah terdiri dari 6 (enam) indikator: (a) Pelaksanaan evaluasi diri; (b) visi, misi dan tujuan; (c) perencanaan; (d) pelaksanaan; (e) pemeriksaan/evaluasi; dan (f) pelaporan.

### 4. Sarana & Prasarana

Indikator yang dikaji untuk variabel sarana dan prasarana meliputi ketersediaan dan kecukupan serta kualitas ruang belajar, ruang kepala sekolah, ruang guru, tempat berolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, tempat berkreasi, sumber belajar lain (termasuk penggunaan teknologi dan komunikasi).

Kecukupan ruang kelas ditunjukkan oleh rasio jumlah kelas terhadap rombongan belajar. Rasio kurang dari 1 menunjukkan kekurangan kelas sehingga sekolah tersebut melakukan dua waktu belajar, yaitu kelas pagi dan kelas siang. Rata-rata rasio kelas dengan rombongan belajar sebesar 0,72. Ini berarti masih terdapat kekurangan ruang kelas. Bahkan ada satu sekolah dengan rasio kelas rombongan belajarnya hanya 0,42. Ini berarti kebutuhan ruang kelas pada sekolah tersebut baru tercukupi sebesar 42%.

Keberadaan ruang kepala sekolah yang terpisah baik dengan ruang kelas maupun ruang guru menunjukkan ketersediaan sarana prasarana sekolah yang memadai. Tidak semua sekolah memiliki ruang kepala sekolah yang memadai. Hanya 29,5 sekolah yang memiliki ruang kepala sekolah yang khusus diperuntukkan bagi kepala sekolah. Ketersediaan ruang guru di sekolah ditampilkan pada Tabel 4-27. Dari tabel tampak bahwa ruang guru tersedia di 57,7% sekolah.

Tabel 10. Keberadaan Ruang Guru

<b>Keberadaan Ruang Guru</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Ada	45	57,7
Tidak	21	26,9
Tidak Menjawab	12	15,4

Keberadaan tempat berolahraga merupakan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Tempat berolahraga dapat saja menyatu dengan fungsi-fungsi lain, tetapi tempat berolahraga yang terpisah dan khusus untuk berolahraga saja menunjukkan bahwa sekolah tersebut memiliki sarana olahraga yang layak. Hal ini tampak pada Tabel11.

Tabel 11. Keberadaan Tempat Berolahraga

<b>Keberadaan Tempat Berolahraga</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Ada dan Terpisah	11	14,1
Ada tetapi Menyatu dengan Fungsi Lain	27	34,6
Tidak Ada	27	34,6
Tidak Menjawab	13	16,7

Hasil pendidikan diharapkan bukan hanya meliputi aspek kognisi saja, melainkan juga meliputi pembinaan keagamaan. Tempat beribadah merupakan sarana untuk mengembangkan perilaku keagamaan siswa. Tabel 12 memperlihatkan keberadaan sarana beribadah di sekolah.

Tabel 12. Keberadaan Tempat Beribadah

<b>Keberadaan Tempat Beribadah</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Ada dan Terpisah	10	12,8
Ada tetapi Menyatu dengan Fungsi Lain	13	16,7
Tidak Ada	48	61,5
Tidak Menjawab	7	9

Untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Belajar aktif siswa merupakan salah satu kondisi yang diinginkan dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Peran guru merupakan fasilitator belajar, oleh karena itu, perpustakaan merupakan sarana yang sangat diperlukan supaya siswa dapat menggali informasi dan pemahaman secara mandiri. Keberadaan perpustakaan di sekolah-sekolah. Hanya 39,7% sekolah yang memiliki perpustakaan. Dari sekolah yang memiliki perpustakaan tersebut, jumlah koleksi buku yang tersedia belum mencukupi seperti yang tampak pada Tabel 13.

Tabel 13. Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia

Jenis Buku	Jumlah Sekolah yang memiliki Koleksi (N)	Rata-rata Jumlah Koleksi	Jumlah Koleksi Tertinggi	Jumlah Koleksi Terendah	Simpangan Baku
Buku Teks	21	294	900	20	288
Buku Pengayaan	16	95	350	6	100
Buku Rujukan	12	11	40	2	12
Buku Fiksi	12	110	520	2	188

Dari 12 sekolah sampel yang memiliki perpustakaan, hanya satu sekolah yang memiliki ruang khusus untuk perpustakaan tersebut. Terdapat 28 sekolah yang memiliki tempat bermain khusus, sedangkan 37 sekolah memiliki tempat bermain yang menyatu dengan fungsi lain. Dari 69 sekolah memiliki aliran listrik, hanya 1 yang tidak mempunyai aliran listrik. Besarnya daya listrik yang dimiliki oleh sekolah tersebut adalah sebesar 450 watt dan 900 watt. Selebihnya berkisar antara 1400 watt sampai 1800 watt. Dari 78 sekolah sampel yang diteliti, terdapat 25 sekolah yang memiliki telepon. Tetapi ada yang tidak memiliki telepon lebih banyak lagi (47 sekolah).

Terdapat 25 sekolah yang memiliki komputer, sedangkan 47 sekolah tidak memiliki komputer. Secara umum pengadaan komputer rata-rata

setiap sekolahnya adalah sebanyak 1 set komputer, meskipun terdapat satu sekolah yang memiliki 5 set komputer. Sedangkan untuk pengaksesan ke internet, terdapat 71 sekolah yang tidak dapat mengakses ke internet.

### **Kontribusi Pendidik, Pengelolaan, dan Sarana & Prasarana terhadap Hasil Belajar**

Hasil komputasi menggunakan LISREL 8.50 menunjukkan bahwa kontribusi pendidik, pengelolaan, dan sarana & prasarana tidak membuahkan model yang dapat menggambarkan hubungan kontributif antar variabel tersebut. Data yang tersedia tidak dapat mendeteksi adanya kontribusi pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana terhadap hasil belajar siswa pada SD Negeri di Provinsi Banten.

Dengan perkataan lain, data yang tersedia tidak dapat mendeteksi adanya kontribusi pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana terhadap hasil belajar siswa pada SD Negeri di Provinsi Banten.

### **Kesimpulan**

- a. Kondisi pendidik SDN di Provisni Banten dicirikan oleh masih tingginya proporsi pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan D2 (67,5%), berpendidikan D2 kependidikan. Sedangkan pendidik dengan kulaifikasi pendidikan S1 baru mencapai 23,2%. Selain itu, guru-guru tersebut kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan untuk meningkatkan mutu pendidik. Sebanyak 68,14%, guru-guru menyatakan tidak pernah mendapatkan pendidikan pelatihan dalam jabatan selama lima tahun terakhir.
- b. Pengelolaan sekolah pada umumnya telah dilaksanakan secara cukup baik. Lebih dari 80% sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan, meskipun implementasinya sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan baru dilaksanakan oleh sekitar 40% sekolah. Selain itu,

berdasarkan pandangan para kepala sekolah, visi, misi, dan tujuan tersebut belum dipahami sepenuhnya oleh seluruh warga sekolah.

- c. Sarana prasarana sekolah masih menjadi kendala bagi sekolah-sekolah. Ruang kepala sekolah yang khusus bagi kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan baru dinikmati oleh 29,5% kepala sekolah. Perpustakaan baru dimiliki oleh 39,7 sekolah. Sekolah yang memiliki ruang khusus untuk perpustakaan bahkan baru 8,3%. Pada sekolah-sekolah yang memiliki perpustakaan tersebut, ternyata koleksi yang tersedia rata-rata kurang dari 500 judul.

Kajian mengenai kontribusi pendidik, pengelolaan, dan sarana & prasarana tidak membuahkan model yang dapat menggambarkan hubungan kontributif antar variabel tersebut. Data yang tersedia tidak dapat mendeteksi adanya kontribusi pendidik, pengelolaan, dan sarana serta prasarana terhadap hasil belajar siswa pada SD Negeri di Provinsi Banten.

### Catatan Akhir:

---

<sup>1</sup> Ministry of National Education (MONE), *Indonesia Educational Statistics in Brief* 2004/2005. Jakarta: Ministry of National Education

<sup>2</sup> Pikiran Rakyat, 4 Mei 2006

<sup>3</sup> MONE, h. 127

<sup>4</sup> Kapanlagi.com, 2006

<sup>5</sup> Brandt, R. "What Do We Mean 'Professional?'" *Educational Leadership*, 5, 50, March, 1993

<sup>6</sup> Banicky, L.A. & Foss, H.K., *Quality matters! Quality Teachers, Quality Teaching*. Delaware: University of Delaware, 1999

<sup>7</sup> Cohen, D., McLaughlin, M., & Talbert, J. (1993). *Teaching for Understanding*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1993

<sup>8</sup> Anderson, R. (1996). *The Study of Curriculum Reform*. <http://www.ed.gov/pubs/SER/CurricReform> (24 Juli 2006)

<sup>9</sup> Supriadi, D., *Membangun bangsa melalui pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004

<sup>10</sup> Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Buku 1 dan 2. Jakarta: Depdiknas, 2001

<sup>11</sup> Schneider, M. (2002). *Do school facilities affect learning?* Washington, DC: National Clearinghouses for Educational Facilities. [<http://www.edfacilities.org>].

<sup>12</sup> <http://ebtanans.org/mutukota/mutukotabawah.htm>

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R. (1996). *The Study of Curriculum Reform*.  
<http://www.ed.gov/pubs/SER/CurricReform> (24 Juli 2006)
- Banicky, L.A. & Foss, H.K. (1999). *Quality matters! Quality Teachers, Quality Teaching*. Delaware: University of Delaware.
- Brandt, R. (1993). "What Do We Mean 'Professional?'" *Educational Leadership*, 5, 50, March.
- Cohen, D., McLaughlin, M., & Talbert, J. (1993). *Teaching for Understanding*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Depdiknas (2001). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Buku 1 dan 2. Jakarta; Depdiknas
- Direktorat Dikmenum. (2000). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Jöreskog, K. and Sörbom, D. 1996. *Lisrel 8: User's Refrence Guide*. Chicago, Illinois: Scientific Software International.
- Kapanlagi.com. (2006). *Mendiknas: UN siap dilaksanakan Mei 2006* [<http://www.kapanlagi.com>]
- Minstry of National Education (MONE). (2005). *Indonesia Educational Statistics in Brief 2004/2005*. Jakarta: Minstry of National Education
- Schneider, M. (2002). *Do school facilities affect learning?* Washington, DC: National Clearinghouses for Educational Facilities. [<http://www.edfacilities.org>].
- Supriadi, D. (2004). *Membangun bangsa melalui pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- World Bank. (1989). *Basic Education Study*. Washington, D.C.: World Bank

---

**Supandi** adalah Dosen Universitas Terbuka